

Volume, 13 Edisi ke 2 Juni 2018

Sistem Pendukung Keputusan Bantuan Bibit Jagung Bagi Gapoktan Menggunakan Algoritma *Simple Additive Weighting* (SAW) (*Haditsah Annur*), Pengaruh Rasio Aktivator Terhadap Kekuatan Mortar Geopolymer Fly Ash Pada Perlakuan Curing Udara (*Fithriyah Arief Wangsa, M.W. Tjaronge, A.B. Muhiddin, dan A.R. Djamaluddin*), Desain Model Peralatan Peluncuran Kapal Kayu Menggunakan *Airbags* Pada Galangan Kapal Rakyat Di Bulukumba (*Andi Dirga Noegraha, Muhammad Rafiq*), Studi Kuat Tekan Beton Ringan Menggunakan Tempurung Kelapa (*Jhon Asik*), Potensi Pembentukan Bioetanol Dari Limbah Pertanian Desa Labuko Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara (*Wa Ndbiale, Sumarlin*), Prediksi Hasil Penjualan Obat Menggunakan *K-Nearest Neighbor* Berbasis *Forward Selection* (*Kartika Chandra Pelangi*), Studi Karakteristik Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Ska/Skt Pada Jasa Konstruksi Di Sulawesi Selatan (*Erniati Bachtiar, Ismail Marsuki, Erdawaty, Abdul Samad A., Nasrullah*), Adsorpsi Ion Pb (II) Menggunakan Arang Kulit Pisang Kepok (*Charcoal musa paradisiaca Linn*) Pada Limbah Cair Industri (*Misda Fauzi*), Sistem Informasi Geografis Lokasi Hutan Konservasi Pada Kantor Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 2 Di Gorontalo (*Misrawati Aprilyana Puspita*), Perubahan Penggunaan Lahan Di Wilayah Perbatasan Kota Makassar – Maros Tahun 1994, 2004 Dan 2014 Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (*Muh. Fikruddin Buraerah Abd Hakim*), Briket Arang Dari Campuran Arang Pelepah Kelapa Dan Batubara (*Yunita Eka Pratiwi*), Tingkat Kematangan Manajemen Pemantauan, Evaluasi Dan Penilaian Teknologi Informasi Pada Laboratorium Komputer Prodi Teknik Informatika Uinam (*Nurul Annisa Abdilla*), Analisa Tingkat Bahaya Erosi Aktual Dan Proyeksi Tingkat Bahaya Erosi Di Sub Das Bila Tahun 2035 (*Reza Asra*), Resistensi Aliran Akibat Abutmen Di Sungai (*Sugianto*), Pengaruh Biaya Promosi Terhadap Volume Penjualan Sepeda Motor Suzuki Pada PT. Sinar Galesong Mandiri Cabang Toraja (*Yuli Kusdiah*), Algoritma *K-Nearest Neighbor* Berbasis *Forward Selection* Untuk Klasifikasi Kredit Sepeda Motor (*Yulianty Lasena*), Analisis Potensi Longsor Di Kabupaten Sinjai Dengan Teknologi Geospasial (*Muhlis dan Muhtar*), Produksi Biodiesel Dengan Bahan Baku Minyak Jelantah Menggunakan Katalis CaO (*Mariaulfa Mustam*), Sintesis Nanokomposit $Fe_3O_4/SiO_2/TiO_2$ -Pani Dan Aplikasinya Untuk Fotoreduksi $[AuCl_4]^-$ (*Nurfika Ramdani, Eko Sri Kunarti, Indriana Kartini*), Pengaruh Pengadukan Pada Proses Pembuatan Minuman Vco (*Virgin Coconut Oil*) Dengan Pelarut Air Kelapa Menggunakan Emulsifier Alami (*Rizka Octavia*), Prediksi Harga Kakao Dengan Menggunakan Metode *K-Nearest Neighbor* Berbasis *Particle Swarm Optimization* (*Yusrianto Malago*), Analisis *Index* Risiko Akibat Timbulnya Waste Material Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi Bangunan Gedung Terhadap Dampak Biaya Dan Lingkungan (Studi Kasus Di Kota Makassar) (*James Thoengsal, Muhammad Amin Rahman*), Monitoring Aspek Urban Design Dalam Penerapan Konsep Creative City Di Kota Makassar (*Khilda Wildana Nur*)



KOPERTIS
WILAYAH IX SULAWESI

Jurnal
Multek

Vol. 13

No. 1

Hal. 255-520

Makassar
Juni 2018

ISSN : 1907-6924

Jurnal Multek

ISSN No.1907-6924

Ketua Penyunting Pelaksana

H. Syahrir Mallongi

Wakil Ketua Penyunting

Alimuddin

Redaksi Pelaksana

Muh. Syahrir Habiba

Zulfikar

Editor

Aladin

Tata Usaha

Buyung Romadhani

Amirullah

Muh. Badar

Cucut Susanto

Alamat Redaksi : Kantor KPN Bung Kopertis Wil. IX Sulawesi
Jl. Bung Km. 9 Tamalanrea Makassar Telp (0411)586242
Homepage : www.jurnalbung.com
E-mail: ria_kpn@yahoo.co.id & muhm_ilyas@yahoo.co.id

JURNAL MULTEK

ISSN. No. 1907-6924

Volume 13. Nomor 2 Juni 2018

DAFTAR ISI

- Sistem Pendukung Keputusan Bantuan Bibit Jagung Bagi Gapoktan Menggunakan Algoritma *Simple Additive Weighting* (SAW) 255-263
Haditsah Annur
- Pengaruh Rasio Aktivator Terhadap Kekuatan Mortar Geopolymer Fly Ash Pada Pertakuan Curing Udara 264-276
Fithriyah Arief Wangsa, M.W. Tjaronge, A.B. Muhiddin, dan A.R. Djamaluddin
- Desain Model Peralatan Peluncuran Kapal Kayu Menggunakan *Airbags* Pada Galangan Kapal Rakyat Di Bulukumba 277-291
Andi Dirga Noegraha, Muhammad Rafiq
- Studi Kuat Tekan Beton Ringan Menggunakan Tempurung Kelapa 292-302
Jhon Asik
- Potensi Pembentukan Bioetanol Dari Limbah Pertanian Desa Labuko Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara 303-313
Wa Ndibale, Sumardin
- Prediksi Hasil Penjualan Obat Menggunakan *K-Nearest Neighbor* Berbasis *Forward Selection* 314-318
Kartika Chandra Pelangi
- Studi Karakteristik Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Ska/Skt Pada Jasa Konstruksi Di Sulawesi Selatan 319-334
Erniati Bachtiar, Ismail Marsuki, Erdawaty, Abdul Samad A., Nasrullah

STUDI KARAKTERISTIK SUMBER DAYA MANUSIA YANG MEMILIKI SKA/SKT
PADA JASA KONSTRUKSI DI SULAWESI SELATAN

¹⁾Erniati Bachtiar, ¹⁾Ismail Marsuki, ¹⁾Erdawaty, ¹⁾Abdul Samad A., ¹⁾Nasrullah

¹⁾Universitas Fajar, Jln. Prof. Abdurrahman Basalamah No.101 Makassar

²⁾ Email: erni@unifa.ac.id / erni_nurzaman@yahoo.com

Abstract

This study aims to determine the characteristics of human resources in construction services, the percentage of human resources who have SKA / SKT on construction services, what factors that affect so that HR does not have SKA / SKT. The method used in this study is a survey with secondary data collection from primary data using a combination of documentation, questionnaires and interviews conducted specifically in the sample area. The selection of sample in this research is as follows: (1) Selection of sample area by using purposive sampling method, that is Makassar City, Maros Regency, Bantaeng Regency, Bone Regency, Enrekang Regency and Palopo City (2) Selection of construction company and consultant with purposive sampling method with criteria of companies registered in associations registered with LPJK. The result of the research revealed that for the characteristics of construction workers in terms of sex dominated by men (97.75%), the productive age of 98.12%, and the level of labor education is generally SD-SMA (54.98%) . The number of permanent and non permanent construction workers amounted to 17,386 kindergartens, only 1485 kindergartens (8.54%) with SKA / SKT for 6 regions consisting of 484 (2.78%) kindergartens with SKA and 1001 TK (5.76%) who have SKT. The reasons for the construction workforce do not have SKA / SKT in Sul-Sel in sequence generally because 1) lack of information about SKA / SKT, 2) lack of socialization of SKA / SKT function, 3) SKA / SKT does not guarantee the increase of salary and career jejang, 4) SKA / SKT is not guaranteed to get a job, 5) SKA / SKT does not guarantee skill improvement, 6) SKA / SKT only tender requirements / SBU, 7) SKA / SKT needs high cost, 8) number of requirements & procedures equipped to obtain SKA / SKT.

Keywords: Characteristics of human resources of construction, SKA / SKT, Construction Services.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik sumber daya manusia pada jasa konstruksi, persentase SDM yang memiliki SKA/SKT pada jasa konstruksi, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga SDM tidak memiliki SKA/SKT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan pengumpulan data sekunder dari data primer menggunakan kombinasi teknik-dokumentasi, kuesioner dan wawancara yang dilakukan khusus di daerah sampel. Adapun tahapan pemilihan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Pemilihan daerah sampel dengan menggunakan purposive sampling method, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bone, Kabupaten Enrekang dan Kota Palopo (2) Pemilihan perusahaan konstruksi dan konsultan dengan purposive sampling method dengan kriteria perusahaan yang terdaftar pada asosiasi yang terdaftar pada LPJK. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Untuk Karakteristik tenaga kerja konstruksi dari segi jenis kelamin didominasi oleh laki-laki (97,75%), yang berumur produktif sebanyak 98,12%, dan tingkat Pendidikan tenaga kerja tersebut umumnya SD-SMA (54,98%). Adapun Jumlah tenaga kerja konstruksi baik tetap maupun tidak tetap berjumlah 17.386 TK, hanya 1485 TK (8,54%) yang memiliki SKA/SKT untuk 6 wilayah yang terdiri dari 484 (2,78%) TK yang memiliki SKA, dan 1001 TK (5,76%) yang memiliki SKT. Adapun alasan Tenaga Kerja Konstruksi tidak memiliki SKA/SKT di Sul-Sel secara berurutan umumnya karena 1) kurangnya informasi tentang SKA/SKT, 2) kurangnya sosialisasi fungsi SKA/SKT, 3) SKA/SKT tidak menjamin peningkatan gaji dan jejang karier, 4) SKA/SKT tidak menjamin mendapatkan pekerjaan, 5) SKA/SKT tidak menjamin peningkatan keahlian/keterampilan, 6) SKA/SKT hanya persyaratan tender/SBU, 7) SKA/SKT membutuhkan biaya yang tinggi, 8) banyaknya persyaratan & prosedur yang harus dilengkapi untuk memperoleh SKA/SKT.

Kata kunci: Karakteristik SDM tenaga konstruksi, SKA/SKT, Jasa Konstruksi.

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang memiliki peranan penting dalam sebuah perusahaan. Apabila tidak ada sumber daya manusia, maka perusahaan tersebut tidak dapat terorganisasi dan berjalan sesuai rencana. Kualitas tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri tenaga kerja itu sendiri seperti pendidikan formal, pengalaman kerja, karakteristik fisik yang berupa kesehatan fisik, serta karakteristik pribadi dan tipe kepribadian tenaga kerja, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas tenaga kerja dapat berasal dari lingkungan kerja dan sistem manajemen perusahaan (Simamora dkk, 2011). Dewasa ini kebutuhan masyarakat di berbagai bidang kehidupan mengalami peningkatan yang cukup signifikan termasuk di antaranya adalah di bidang pembangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan merupakan prioritas sebagian besar masyarakat dan pemerintah untuk dapat bersaing di era globalisasi sekarang ini. Pembangunan tersebut tidak lepas dari besarnya peranan industri konstruksi yang melibatkan banyak pihak untuk saling bekerjasama sehingga terbentuk suatu organisasi konstruksi yang baik. Pelaksanaan proyek konstruksi membutuhkan suatu manajemen untuk mengolah kegiatan suatu konstruksi. Dengan kata lain, kegiatan pelaksanaan proyek konstruksi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara, yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumberdaya tertentu dan dimaksudkan untuk menghasilkan produk

dengan kriteria-kriteria yang telah digariskan secara jelas dalam kontrak.

Undang-undang jasa konstruksi (UUJK) no 18 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi beserta perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 mengatur tentang syarat yang harus dimiliki tenaga kerja konstruksi yakni harus memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat keterampilan (SKT) dengan tujuan agar usaha jasa konstruksi di Indonesia menjadi kokoh, andal, dan berdaya saing tinggi serta menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas. Namun di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan masih banyak tenaga kerja konstruksi yang belum memilikinya.

Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam mengerjakan suatu proyek, dilihat dari seberapa besar kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) dari perusahaan tersebut. Keberhasilan suatu perusahaan diukur dengan kinerja dan kualifikasi SDM, dimana kinerja perusahaan sendiri sangat ditentukan oleh kualifikasi SDM masing-masing individu dalam perusahaan tersebut. Kinerja perusahaan yang baik dapat dilihat dari sejauh mana perusahaan tersebut dapat bertahan dan mempunyai kualifikasi SDM yang profesional dimana semakin banyaknya perusahaan yang lain yang turut serta dalam pekerjaan proyek konstruksi.

Saat ini di Indonesia telah terdapat beberapa perusahaan konstruksi khususnya di Sulawesi Selatan baik kontraktor ataupun konsultan yang menangani beberapa pekerjaan/proyek konstruksi. Dengan banyaknya perusahaan konstruksi maka tentu saja kualifikasi dan

klasifikasi dari perusahaan-perusahaan tersebut berbeda satu sama lain. Sumber daya manusia di sebuah perusahaan dibagi menurut kemampuannya masing-masing seperti teknik yang dimiliki/dikuasai pada suatu bidang tertentu. Sumber daya dalam suatu proyek konstruksi dibagi menjadi beberapa bagian yang harus dikelola seperti perencanaan, persiapan, pelaksanaan, maupun setelah proyek tersebut selesai. Dalam hal ini perlu ada SDM yang handal perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dalam proyek tersebut. Sumber daya manusia atau organisasi yang bertugas dalam pengelolaan proyek, harus mempunyai SDM yang telah terlatih, terampil, terdidik, bersertifikat dalam melaksanakan pekerjaan ditunjang dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Dengan adanya tenaga kerja yang bersertifikat diantaranya Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta kualitas kerja bagi perusahaan jasa konstruksi yang ada di Sulawesi Selatan.

Penelitian oleh Jelantik dkk (2014) tentang faktor yang mempengaruhi sehingga tenaga kerja tidak memiliki SKA/SKT antara lain pekerjaan dapat dimiliki tanpa memiliki SKA/SKT, SKA/SKT tidak sepenuhnya menjadi syarat pada proyek pemerintah/non pemerintah, tidak ada jaminan jika memiliki SKA/SKT diprioritaskan dalam pekerjaan, tidak ada jaminan peningkatan gaji jika memiliki SKA/SKTK, tidak ada jaminan bila memiliki SKA/SKTK ada peningkatan jenjang karir dan peningkatan keahlian/keterampilan kerja.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui karakteristik sumber daya manusia pada jasa konstruksi (2)

Mengetahui persentase SDM yang memiliki SKA/SKT pada jasa konstruksi (3) Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga SDM tidak memiliki SKA/SKT. Penelitian ini dibatasi dengan ruang lingkup sebagai berikut (1) Responden penelitian adalah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi dan Perusahaan Jasa konstruksi (CV dan PT) di Sulawesi Selatan (2) Data yang digunakan merupakan data primer yang berupa hasil survei dengan cara mendistribusikan kuisisioner kepada tenaga kerja di perusahaan jasa konstruksi baik dikantor maupun yang ada dilapangan dan data skunder yang diperoleh dari LPJK.net.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran mengenai Karakteristik Sumber Daya Manusia yang memiliki SKA/SKT dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga SDM tidak memiliki SKA/SKT pada jasa konstruksi pada Tahun 2016, sehingga didapat deskripsi yang detail. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti, penelitian deskriptif juga berusaha mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas, teliti, dan lengkap. Penelitian deskriptif digunakan jika ada pengetahuan atau informasi tentang gejala sosial yang akan diselidiki atau dipermasalahkan (Silalahi, 2009).

Adapun tahapan pemilihan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemilihan daerah sampel yang menjadi lokasi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penentuan sampel secara purposif (*purposive sampling method*), yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bone, Kabupaten Enrekang dan Kota Palopo. Adapun kriteria : (a) Memiliki potensi besar untuk mengembangkan dan mendukung aktivitas konstruksi (b) Daerah Selatan, Utara, dan Tengah
2. Pemilihan perusahaan konstruksi dan konsultan yang menjadi sampel penelitian ini dengan metode penentuan sampel secara purposif (*purposive sampling method*) dengan kriteria perusahaan yang terdaftar pada asosiasi yang terdaftar pada LPJK. Dari jumlah perusahaan yang terdaftar di setiap Wilayah maka ditentukan jumlah sampel perusahaan yang diambil dengan ketentuan berdasarkan Mursalam 2006, dengan pengelompokan yakni (a) 1 - 100 : 20% (b) 100 - 500 : 40% (c) 500 - 1000 : 20%, dan (d) >1000 : 15-20%
3. Pemilihan SDM diambil dari tenaga ahli dan tenaga terampil yang bekerja pada kontraktor pelaksana proyek dan Ijin Usaha Jasa Konstruksinya berlokasi di Kabupaten/Kota terpilih yakni asosiasi yang terdaftar pada LPJK.

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Penelitian deskriptif mempunyai karakteristik (a) Penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena dengan cara menelaah

secara teratur-ketat, mengutamakan obyektivitas, dan dilakukan secara cermat (b) Tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan, dan tidak adanya uji hipotesis Furchan (2004). Prosedur analisa data adalah: Editing, Koding, dan Tabulasi. Setelah melalui proses tersebut, maka selanjutnya dilakukan analisis dengan untuk mendapatkan gambaran umum dengan cara mendiskripsikan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian dengan melihat distribusi frekuensi, mean, dan trend, dilakukan dengan metode persentase setiap variabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan, kefungisian dan/atau keahlian tertentu yang diatur pada Peraturan LPJK No. 04 Tahun 2011. Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK) merupakan sertifikat yang diberikan kepada tenaga kerja terampil yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin, keilmuan dan atau keterampilan tertentu yang diatur pada Peraturan LPJK No. 05 Tahun 2011.

Dari hasil penelitian klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli yang ada di Sulawesi Selatan terlihat klasifikasi jumlah tenaga ahli terdiri dari 40 klasifikasi, dan 3 (tiga) kualifikasi yakni utama, madya dan muda. Jumlah tenaga ahli sebanyak 4.388 orang, yang terdiri dari kualifikasi utama 0 orang (0%), kualifikasi madya 2.511 orang (57,2%), dan kualifikasi muda 1.877 orang

(42,8%). Klasifikasi dan kualifikasi tenaga terampil yang ada di Sulawesi Selatan terlihat klasifikasi jumlah tenaga terampil terdiri dari 192 klasifikasi, dan 3 (tiga) kualifikasi yakni utama, madya dan muda. Jumlah tenaga terampil sebanyak 8.486 orang, yang terdiri dari kualifikasi utama 1.544 orang (18%), kualifikasi madya 1.009 orang (11,9%), dan kualifikasi muda 5.933 orang (69,9%). Berdasarkan data tersebut, jumlah tenaga kerja dibidang konstruksi yang memiliki SKA/SKT sebanyak 12.874 orang di Sulawesi Selatan.

Karakteristik Perusahaan Berdasarkan Wilayah

Karakteristik perusahaan pelaksana dan jasa konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dilaksanakan, penentuan daerah sasaran dan jumlah sampel/ perusahaan dan jumlah responden dibagi dalam enam wilayah kerja, yakni wilayah satu adalah Makassar, Kabupaten Gowa, dan Takalar diwakili oleh perusahaan pelaksana dan jasa konstruksi yang beroperasi di Kota Makassar, wilayah dua adalah Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Parepare yang diwakili oleh perusahaan pelaksana dan jasa konstruksi yang beroperasi di Kabupaten Maros, wilayah tiga adalah Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Bulukumba yang diwakili oleh perusahaan Pelaksanan dan jasa konstruksi yang beroperasi di Kabupaten Bantaeng, wilayah empat terdiri atas Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sinjai yang diwakili oleh perusahaan pelaksanaan dan jasa konstruksi yang

beroperasi di Kabupaten Bone, sedangkan wilayah lima adalah Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara yang diwakili oleh perusahaan pelaksana dan jasa konstruksi (PPJK) yang beroperasi di Kabupaten Enrekang, serta wilayah enam adalah daerah Luwu raya yang terdiri atas Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur yang diwakili oleh perusahaan pelaksanaan dan jasa konstruksi yang beroperasi di Kota Palopo.

Karakteristik dan profil perusahaan pelaksanaan dan jasa konstruksi dan setiap kota dan kabupaten diperoleh dengan menjalankan dua instrument utama yakni: *pertama* pengisian kuesioner dan *kedua* kunjungan lapangan atau observasi dan wawancara langsung kepada pemilik perusahaan pelaksana dan jasa konstruksi. Data yang diperoleh selanjutnya disebut data primer. Data sekunder dibutuhkan untuk melengkapi *base line* karakteristik dan profil perusahaan pelaksanaan dan jasa konstruksi, sehingga data yang disajikan merupakan data otentik berdasarkan keadaan dan kondisi perusahaan konstruksi di wilayah masing-masing.

Data sekunder diperoleh dengan melakukan kunjungan dan wawancara terhadap beberapa organisasi, asosiasi atau perhimpunan perusahaan pelaksanaan dan jasa konstruksi yang ada di Sulawesi Selatan dan di daerah/ kota setempat, dan permintaan data yang ada disetiap asosiasi. Asosiasi yang dimaksud seperti GAPENSI, GAPEKSINDO, AKLINDO, ASKONAS

AKSI, AKLI, ASKINDO, ASPEKNAS, PERKINDO, GAPEKNAS, dan asosiasi terkait lainnya. Data sekunder juga diperoleh dengan melakukan pengumpulan data pada dinas atau instansi terkait baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten dan kota dari daerah yang mewakili wilayah. Dinas dimaksud adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappeda, Dinas Keairan dan asisten daerah bidang pembangunan. Bahan perbandingan dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dilakukan secara daring melalui internet khususnya pada asosiasi yang memiliki *website*.

Penentuan jumlah perusahaan pelaksana dan jasa konstruksi yang didata mengikuti cara penentuan sampel berdasarkan keseluruhan jumlah perusahaan menurut persentase yang disebut populasi, jumlah perusahaan selanjutnya disampling berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditentukan berdasarkan pertimbangan penelitian yang selanjutnya disebut responden sampel. Data perusahaan berupa data karakteristik dan profil perusahaan pelaksanaan dan jasa konstruksi yang dilakukan berdasarkan informasi dari kuesioner isian yang disusun mencakup pada 6 (enam) variabel, yakni: (1) Kategori usaha; 2) jasa yang ditawarkan dan dilaksanakan; 3) kualifikasi usaha; 4) klasifikasi pekerjaan/ proyek; 5) Tenaga kerja tetap yang dimiliki dan 6) Tenaga kerja tidak tetap perusahaan pelaksanaan dan jasa konstruksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 754 perusahaan pelaksana dan jasa konstruksi yang disurvei yang

terdiri atas 158 (20,95%) berbentuk PT dan 596 (78,05%) berbentuk CV. Kota Makassar memiliki jumlah PT terbanyak, menunjukkan bahwa Perusahaan Pelaksana dan Jasa Konstruksi (PPJK) Kota Makassar umumnya perusahaan besar yang dapat mengerjakan proyek-proyek konstruksi besar dan menengah. Kabupaten Maros dan Kabupaten Enrekang tidak memiliki perusahaan pelaksana dan jasa konstruksi (PPJK) berbentuk PT.

Jasa usaha yang ditawarkan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Makassar memiliki PPJK berjenis konsultan 171 (22,68%) dan kontraktor 583 (77,32%) paling banyak dibandingkan dengan daerah lain yang disurvei. Daerah yang tidak memiliki perusahaan jenis konsultan adalah Kab. Maros, sedangkan perusahaan jenis kontraktor paling sedikit adalah Kab. Enrekang. Data di atas memberi gambaran bahwa jumlah perusahaan pelaksana konstruksi di daerah Sulawesi Selatan cukup bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, demikian pula perusahaan jasa konstruksi juga sangat bervariasi antara daerah di Sul-Sel.

Gambaran kualifikasi usaha perusahaan pelaksanaan dan jasa konstruksi berdasarkan hasil penelitian, dimana tampak bahwa dari 754 PPJK yang disurvei, terdapat 583 (77,32%) perusahaan kualifikasi kategori kecil, 146 (19,36%) kategori kualifikasi menengah dan 25 (3,32%) adalah perusahaan kategori kualifikasi besar. Berdasarkan daerah operasi, terlihat bahwa Kab. Maros, Kab. Bantaeng dan Kab. Enrekang tidak memiliki perusahaan

konstruksi kualifikasi menengah dan perusahaan kualifikasi besar, dengan kata lain bahwa PPJK pada setiap daerah di Sul-Sel sangat bervariasi dan didominasi oleh PPJK kualifikasi kecil.

Gambaran umum tentang PPJK berdasarkan klasifikasi pekerjaan/ proyek juga bervariasi, khususnya pada enam daerah yang disurvei. Klasifikasi pekerjaan yang dikerjakan oleh PPJK didominasi oleh pekerjaan jalan dan jembatan mencapai 651 (31,62%), menyusul pekerjaan gedung dan keairan masing-masing berjumlah 644 (31,28%). Hal yang unik dari 754 PPJK yang disurvei, berdasarkan izin yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, memberi informasi bahwa terdapat 200 (26,53%) PPJK yang dapat mengerjakan hampir semua jenis pekerjaan konstruksi, mulai dari jalan, jembatan, berbagai jenis gedung, berbagai jenis pekerjaan keairan, pekerjaan kelistrikan, rel kereta api dan banyak lagi jenis pekerjaan konstruksi yang dapat dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, meskipun kualifikasi perusahaan kategori kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa penerbitan izin perusahaan berdasarkan spesifikasi pekerjaan yang dapat dikerjakan belum dilakukan secara selektif berdasarkan persyaratan dan kriteria yang ada, dengan kata lain bahwa jenis pekerjaan yang tertera dalam izin usaha konstruksi, belum dilakukan secara tersistem dan profesional.

Informasi yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian memberikan gambaran bahwa pegawai/ pekerja tetap yang ada di Sul-Sel yang berstatus sebagai pegawai tetap pada PPJK masih sangat sedikit. Secara rata-rata untuk

perusahaan pelaksana konstruksi kualifikasi kecil, sebagian besar hanya memiliki 1 orang pegawai tetap memiliki SKT, demikian pula untuk perusahaan jasa konstruksi juga umumnya hanya memiliki 1 orang pegawai tetap yang memiliki SKA, meskipun perusahaan pelaksanaan dan jasa konstruksi memiliki jumlah pegawai yang cukup banyak. Hal ini menggambarkan bahwa kepemilikan pegawai bersertifikat hanyalah sebagai pemenuhan syarat untuk kepentingan pekerjaan khususnya pada saat proses tender. Jumlah pegawai tetap yang memiliki sertifikat konstruksi pada 754 PPJK yang disurvei di enam daerah berbeda yakni pegawai tetap memiliki SKA sebanyak 368 (9,95%) dari jumlah pegawai tetap sebanyak 2510 pegawai tetap, yang memiliki SKT sebanyak 822 (22,22%), dan yang tidak memiliki SKA/SKT sebanyak 1320 (52,59%).

Hasil wawancara terhadap beberapa pegawai tetap yang bekerja pada PPJK, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa pegawai yang ternyata memiliki sertifikat SKT atau SKA, namun yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki SKA/SKT, demikian pula ditemukan beberapa pegawai yang memiliki SKA/SKT, namun sertifikat yang bersangkutan disimpan oleh pemilik/ pimpinan PPJK. Daerah yang memiliki jumlah pegawai tetap memiliki SKA/SKT terbanyak adalah Kota Makassar, disusul Kota Palopo, sedangkan daerah yang jumlah pegawai tetap pada PPJK paling sedikit memiliki SKA/SKT adalah Kab. Enrekang dan Kab. Bantaeng, disusul Kab. Maros dan Kab. Bone.

Dari hasil penelitian memberi gambaran bahwa terdapat 19.157 pegawai tidak tetap yang bekerja pada 754 PPJK yang disurvei. Dari jumlah tersebut hanya ada 116 (0,76%) yang memiliki SKA, 179 (1,18%) yang memiliki SKT dan 14.581 (98,02%) yang tidak memiliki SKA/SKT. Berdasarkan Tabel 4.2.5 dan 4.2.6, memberi gambaran umum bahwa tenaga kerja konstruksi yang ada di Sul-Sel baik yang berstatus sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap yang bekerja pada PPJK masih kurang profesional secara administrasi sebagai tenaga kerja ahli ataupun terampil, meskipun ditemukan beberapa pegawai yang sebenarnya memiliki sertifikat SKA/SKT secara administrasi, namun yang bersangkutan tidak merasa pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka memperoleh sertifikat konstruksi baik sebagai tenaga ahli maupun tenaga terampil, walaupun diantara pegawai tersebut ada yang dapat dikategorikan sebagai tenaga terampil berdasarkan pengalaman dan lama kerja.

Kemudian jumlah tenaga kerja konstruksi baik tetap maupun tidak tetap berjumlah 17.386 TK, 484 (2,78%) TK yang memiliki SKA, dan 1001 TK (5,76%) yang memiliki SKT. Dengan demikian dari 754 PPJK untuk 6 wilayah terdiri dari 1485 TK (8,54%) yang memiliki SKA/SKT.

Karakteristik Tenaga Kerja Berdasarkan Wilayah

Profil dan karakteristik tenaga kerja (TK) perusahaan pelaksana dan jasa konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dilaksanakan, juga dibagi

dalam enam wilayah kerja mengikuti data dan profil perusahaan pelaksana dan jasa konstruksi di wilayah masing-masing, yakni tenaga kerja (TK) pelaksana dan jasa konstruksi wilayah *satu* meliputi Makassar, Kabupaten Gowa, dan Takalar diwakili oleh profil dan data TK perusahaan pelaksana dan jasa konstruksi (PPJK) yang bekerja di Kota Makassar, demikian pula untuk wilayah *dua* adalah TK konstruksi Kabupaten Maros, Kabupaten Pengkep dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Parepare yang diwakili oleh tenaga kerja (TK) pelaksana dan jasa konstruksi yang bekerja di Kabupaten Maros, wilayah *tiga* diwakili oleh TK pada perusahaan Pelaksanan dan jasa konstruksi yang bekerja di Kabupaten Bantaeng, wilayah *empat* adalah TK pada perusahaan pelaksana dan jasa konstruksi Kabupaten Bone, sedangkan wilayah *lima* adalah TK pada perusahaan pelaksana dan jasa konstruksi (PPJK) yang diwakili oleh TK yang bekerja pada PPJK yang beroperasi di Kabupaten Enkang, serta wilayah *enam* adalah TK yang bekerja pada PPJK yang bekerja di Kota Palopo.

Karakteristik dan profil TK PPJK dari setiap kota dan kabupaten yang diperoleh menggunakan dua instrument, yakni: *pertama* pengisian kuesioner dan *kedua* kunjungan lapangan atau observasi dan wawancara langsung kepada pemilik TK yang bekerja pada perusahaan pelaksana dan jasa konstruksi. Data yang diperoleh selanjutnya diskoring dan ditabulasi sebagai data primer. Data primer yang diperoleh diperkuat dengan data sekunder yang diperoleh dengan

observasi dan wawancara pada beberapa perwakilan perusahaan pelaksana dan jasa konstruksi, sehingga data yang disajikan merupakan data otentik berdasarkan keadaan dan kondisi TK pada setiap perusahaan pelaksana dan jasa konstruksi di wilayah survey. Data sekunder juga banyak diperoleh dari beberapa asosiasi atau perhimpunan perusahaan pelaksana dan jasa konstruksi yang ada di Sulawesi Selatan dan di daerah/ kota setempat, seperti data TK dari Gapensi, Gapeksindo, AKLINDO, ASKONAS, AKSI, AKLI, ASKINDO, ASPEKNAS, Perkindo, GAPEKNAS, dan asosiasi terkait lainnya. Bahan perbandingan dari data TK yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dilakukan secara daring melalui internet khususnya pada asosiasi yang memiliki *website*.

Cara penentuan sampel menggunakan metode analisis *axidental sampling*, yaitu didasarkan pada keadaan dan kondisi TK pada saat dilakukan observasi pada setiap perusahaan pelaksana dan jasa konstruksi sasaran. Karakteristik TK yang dianalisis terdiri atas 6 unsur, yakni: (1) Umur TK, (2) Jenis Kelamin; (3) pendidikan; (4) Lama kerja; (5) jenis sertifikat yang dimiliki serta (6) sumber biaya perolehan sertipikat.

Pada umumnya tenaga kerja (TK) konstruksi pada enam daerah yang merupakan daerah perwakilan wilayah, didominasi oleh TK produktif berdasarkan umur, yaitu mereka berada pada usia 15-64 tahun mencapai 3.699 (98,12%) dari jumlah TK yang disurvei sebanyak 3770 orang, dan hanya terdapat 71 (1,88%) TK dengan umur di atas 65 tahun, kategori kurang produktif.

Berdasarkan temuan dilapangan didapatkan bahwa mereka yang berusia kurang produktif umumnya memiliki atau bertugas sebagian sebagai mandor dan sebagian lagi ada yang berstatus sebagai pemilik PPJK. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterlibatan TK usia di atas 64 tahun tidak akan mempengaruhi kualitas dan kecepatan kerja konstruksi, justru sebaliknya mereka yang tua dijadikan sebagai pembina, dihormati atau mereka yang dituakan untuk memberikan pembinaan, memimpin dan mengkoordinir suatu jenis pekerjaan konstruksi dan tenaga kerja lainnya.

Dari Analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah TK terbanyak berjenis kelamin laki-laki mencapai 3.685 (97,75%) dari jumlah TK yang disurvei sebanyak 3.770 orang, dan hanya 85 (2,25%) yang berjenis kelamin perempuan. Hasil observasi lapangan khususnya terhadap TK perempuan adalah mereka berstatus sebagai tenaga kerja (TK) ahli dengan jenis pekerjaan yang dijalani sebagian besar sebagai pengawas dan penyediaan jasa konstruksi. TK perempuan tersebut sebagian besar bekerja pada perusahaan jasa konstruksi, meskipun ada yang ditemukan bekerja sebagai TK pada bidang pelaksana konstruksi.

Keberadaan perempuan dalam suatu jenis pekerjaan yang didominasi laki-laki dapat dimaklumi dan sudah menjadi bagian yang dijamin oleh undang-undang ketenagakerjaan, bahwa suatu jenis pekerjaan tidak lagi membatasi TK perempuan untuk bekerja pada jenis pekerjaan tertentu dan spesifik seperti pekerjaan konstruksi, terlebih lagi bahwa mereka pada umumnya berstatus

sebagai tenaga kerja ahli dan jenis pekerjaan yang dijalani adalah pekerjaan jasa pengawasan.

Informasi tentang tingkat pendidikan tenaga kerja (TK) pekerja konstruksi pada 754 perusahaan pelaksanaan dan jasa konstruksi di enam daerah perwakilan wilayah di Sulawesi Selatan. Hasil survey tingkat pendidikan terhadap 3.770 TK konstruksi diperoleh hasil bahwa TK dengan tingkat pendidikan SD-SMA sederajat mendominasi pekerjaan konstruksi yang mencapai 2.073 (54,98%), tingkat pendidikan D1-D4, mencapai 783 (20,77%), TK berpendidikan S1 mencapai 887 (23,53%) dan yang berpendidikan S2-S3 ada 27 (0,72%). Hal ini menunjukkan bahwa TK konstruksi yang bekerja di berbagai daerah tingkat II di Sulawesi Selatan berdasarkan tingkat pendidikan tergolong masih rendah, meskipun demikian dalam lima tahun terakhir mengalami pergeseran tingkat pendidikan ke posisi lebih tinggi dan diperkirakan pada tahun selanjutnya jumlah TK konstruksi berpendidikan SD-SMA sederajat akan mengalami penurunan dan TK berpendidikan sarjana cenderung meningkat.

Informasi yang dapat diperoleh dari hasil penelitian tentang lama kerja tenaga kerja pada PPJK Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tahun. Lama kerja TK perusahaan konstruksi dibagi dalam tiga kategori dengan jumlah masing-masing, yakni dibawah 5 (lima) tahun sebanyak 1.783 TK (47,29%), 6-10 tahun sebanyak 1.476 TK (39,15%) dan di atas 10 (sepuluh) tahun sebanyak 511 TK (13,55%). Lama kerja dalam tahun akan berbanding lurus dengan

pengalaman dan keterampilan, artinya TK konstruksi dengan pengalaman kerja 5 tahun ke bawah dapat diasumsikan bahwa TK tersebut belum memiliki keterampilan kerja konstruksi yang memadai, sedangkan TK dengan lama kerja 6-10 tahun dapat dipandang sebagai TK cukup terampil dalam melakukan pekerjaan bidang konstruksi, demikian pula TK dengan waktu kerja di atas 10 tahun juga dapat diasumsikan bahwa pekerja konstruksi tersebut telah memiliki keterampilan kerja konstruksi sangat baik. Asumsi keterampilan kerja berdasarkan waktu kerja sifat sangat relative, artinya bahwa tidak bersifat mutlak mereka yang memiliki waktu kerja konstruksi singkat akan memiliki keterampilan kerja yang kurang dan sebaliknya mereka dengan waktu kerja lama tidak otomatis akan memiliki keterampilan kerja sangat baik, hal ini disebabkan karena masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi keterampilan kerja seseorang, misalnya tingkat pendidikan, hubungan emosional dengan pemilik perusahaan pelaksanaan dan jasa konstruksi, tingkat kesejahteraan pekerja, umur pekerja, dan beberapa faktor lainnya.

Informasi kepemilikan sertifikat konstruksi TK di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan performa Tabel 4.3.5, menunjukkan kepemilikan sertifikat konstruksi dari 3.770 TK konstruksi yang disurvei pada 754 perusahaan pelaksanaan dan jasa konstruksi dari 6 (enam) daerah yang yang disurvei, dengan rincian 573 (15,20%) yang memiliki SKA, 883 (23,42%) yang memiliki SKT, dan sisanya 2.314 (61,38%) tidak memiliki SKA maupun

SKT, dan total kepemilikan SKA/SKT berjumlah 1.456 (38,62%). TK konstruksi adalah Hasil kepemilikan SKA dan SKT dari enam daerah tersebut tergolong tinggi, karena secara rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan hanya mencapai 6,2%, dan rata-rata Nasional mencapai 10% (<http://www.tabloidjubi.com/artikel-1846>).

Hasil tersebut jauh lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan Rata-rata nasional, hal ini disebabkan karena penentuan sampel perusahaan pelaksana dan jasa konstruksi dipenitaskan terhadap PPJK yang memiliki pekerjaan konstruksi atau yang sedang mengerjakan proyek konstruksi di daerah bersangkutan, yang mana dalam perolehan pekerjaan konstruksi telah dipersyaratkan secara ketat tentang kepemilikan sertifikat TK dalam proses tender, dengan demikian dipastikan bahwa kebanyakan PPJK yang disurvei salah satu atau beberapa TK yang memiliki dipastikan memiliki sertifikat SKA atau SKT, namun temuan dilapangan menunjukkan bahwa untuk 1 (satu) jenis PPJK (Konsultan dan kontraktor) yang memiliki jumlah TK rata-rata 15-25 orang ternyata yang memiliki SKA atau SKT hanya 1-2 orang saja atau setara dengan rata-rata sesuai data Sulsel pada angka 6,1%.

Jumlah TK yang memiliki SKA/SKT mencapai 38,62%. Rincian TK yang memiliki sertifikat konstruksi, yakni ada 573 (15,20%) TK yang memiliki SKA dengan biaya sendiri dan ada 883 (23,42%) TK yang memiliki SKT dengan biaya pemerintah atau perusahaan. Jumlah TK yang memiliki SKA/SKT yang biaya mandiri sebanyak 144 TK (9,89%), dan 1.312 TK (90,11%) yang dibiayai

oleh perusahaan /pemerintah. Dari hasil survey, 90,11% TK yang memiliki SKA/SKT merupakan TK tetap konstruksi dan rata-rata merupakan persyaratan dalam pendirian SBU/tender. Hal ini membuktikan bahwa kurangnya antusiasme dari TK konstruksi untuk memiliki sertifikat konstruksi untuk berbagai alasan, padahal seharusnya jika sertifikat konstruksi dianggap sebagai suatu kebutuhan, maka TK konstruksi semestinya sudah sebagian besar punya sertifikat dimaksud.

Secara umum dapat dikatakan bahwa usia TK konstruksi khususnya di daerah Sulawesi Selatan termasuk dalam kategori baik atau produktif, jenis kelamin TK konstruksi didominasi oleh laki-laki, juga merupakan hal yang biasa, sedangkan tingkat pendidikan para TK relative rendah, yakni umumnya hanya berjasah SD s/d SMA, namun demikian bahwa secara bertahap dalam 5 tahun terakhir, para pengelola PT/CV yang bergerak dibidang konstruksi cenderung meningkat. Lama kerja atau pengalaman kerja TK konstruksi umumnya berada pada range usia pekerja konstruksi antara 6-10 tahun berkolerasi dengan usia pekerja pada range 15-64 tahun, hal ini dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pekerja dalam suatu pekerjaan konstruksi terjadi setelah mereka rata-rata berusia 30 tahun. Usia 30 tahun pekerja adalah usia yang sangat produktif dengan kondisi energinya berada pada fase puncak. SKA/SKT bagi para pekerja adalah hal yang sangat penting dalam dekade pembangunan dewasa ini, baik secara nasional maupun dalam tataran global, namun demikian kepemilikan

SKA/SKT bagi pekerja konstruksi masih sangat rendah.

Jika merujuk pada penerapan MEA, dimana terjadi persaingan perebutan pasar kerja secara regional, maka capaian sertifikasi perkerjaan konstruksi di Indonesia masih sangat rendah, untuk itu diperlukan terobosan baru dalam rangka peningkatan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi. Jika dilihat dari hasil survey sebagaimana informasi pada beberapa tabel sebelumnya tentang karakteristik dan profil pekerja konstruksi di Sul-Sel dapat disimpulkan bahwa kurangnya pekerja konstruksi memiliki sertifikat konstruksi baik yang kategori ahli maupun terampil disebabkan oleh banyak hal, seperti kurangnya sosialisasi tentang sertifikasi konstruksi bagi para pekerja, adanya temuan tentang sertifikat konstruksi dapat diperoleh oleh oknum perusahaan pelaksana dan jasa konstruksi, tidak ada penerapan sanksi bagi PPJK yang tidak memiliki sertifikat, pekerja konstruksi merasa tidak memberikan efek positif terhadap karir dan kesejahteraan tenaga kerja TK, biaya perolehan sertifikat mahal, dan berbagai alasannya lainnya.

Faktor yang berhubungan dengan Kepemilikan SKA/SKT

Usaha jasa konstruksi di Indonesia akan menjadi kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas, jika setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan keterampilan Kerja (SKT). Dengan melihat kondisi tenaga kerja konstruksi yang

memiliki SKA/SKT sangat minim khususnya di Sulawesi-Selatan hanya sekitar 6,1% tenaga kerja yang memiliki SKA/SKT, maka dalam penelitian ini akan dikaji penyebab atau alasan sehingga tenaga kerja tidak memiliki sertifikat keahlian. Dari hasil penelitian awal ada beberapa penyebab sehingga tenaga kerja konstruksi tidak memiliki SKA/SKT yakni sebagai berikut :

- 1) SKA/SKT tidak berlaku pada proyek non pemerintah, tdk sepenuhnya sebagai persyaratan pada proyek pemerintah
- 2) SKA/SKT hanya persyaratan tender/SBU
- 3) Kurangnya informasi tentang SKA/SKT
- 4) Kurangnya sosialisasi fungsi SKA/SKT
- 5) Masa berlaku SKA/SKT yang singkat
- 6) Banyaknya persyaratan & prosedur yang harus dilengkapi untuk memperoleh SKA/SKT
- 7) SKA/SKT membutuhkan biaya yang tinggi
- 8) Membutuhkan waktu yang lama dalam memperoleh SKA/SKT
- 9) Sulitnya memilih lembaga/tempat yang tepat untuk memperoleh SKA/SKT
- 10) SKA/SKT tidak menjamin mendapatkan pekerjaan
- 11) SKA/SKT tidak menjamin peningkatan gaji dan jejang karier
- 12) SKA/SKT tidak menjamin peningkatan keahlian/keterampilan

Dari 12 faktor-faktor penyebab tenaga kerja tidak memiliki SKA/SK dinyatakan sebagai simbol faktor ke n (X_n). Hasil penelitian mengenai faktor penyebab tenaga kerja tidak memiliki SKA/SK dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Kategori dan persentase pernyataan terhadap semua variabel (Xn)

Kategori	Interval Skor	Frekuensi	
		Orang	%
Rendah	0 - 8	86	2,28
Sedang	9 - 17	1718	45,57
Tinggi	18 - 24	1966	52,15
Jumlah		3770	100

Tabel 2. Rata-rata nilai faktor variabel TK tidak memiliki SKA/SKT

Variabel	Nilai	Kategori
X1 SKA/SKT tidak berlaku pada proyek non pemerintah, tdk sepenuhnya sebagai persyaratan pada proyek pemerintah	1,27	S
X2 SKA/SKT hanya persyaratan tender/SBU	1,57	SS
X3 Kurangnya informasi tentang SKA/SKT	1,72	SS
X4 Kurangnya sosialisasi fungsi SKA/SKT	1,64	SS
X5 Masa berlaku SKA/SKT yang singkat	1,33	S
X6 Banyaknya persyaratan & prosedur yang harus dilengkapi untuk memperoleh SKA/SKT	1,51	SS
X7 SKA/SKT membutuhkan biaya yang tinggi	1,34	SS
X8 Membutuhkan waktu yang lama dalam memperoleh SKA/SKT	1,32	S
X9 Sulitnya memilih lembaga/tempat yang tepat untuk memperoleh SKA/SKT	1,32	S
X10 SKA/SKT tidak menjamin mendapatkan pekerjaan	1,43	SS
X11 SKA/SKT tidak menjamin peningkatan gaji dan jejang karier	1,49	SS
X12 SKA/SKT tidak menjamin peningkatan keahlian/keterampilan	1,42	SS

Keterangan : (SS) sangat setuju, (S) Setuju, (TS) Tidak Setuju

Tabel 1 menunjukkan kategori dan persentase mengenai pendapat setiap tenaga kerja mengenai variabel (alasan) sehingga tenaga kerja tidak memiliki SKA/SKT. Hasil menunjukkan bahwa kategori rendah sebanyak 86 org (2,28%), dan kategori sedang sebanyak 1718 orang (45,57%) dan kategori tinggi sebanyak 1966 orang (52,15%) dan 3770 responden. Dengan demikian variabel sebanyak dua

belas yang terlihat pada Tabel 4.4.2 memperlihatkan bahwa kurangnya motivasi tenaga kerja konstruksi untuk mengikuti sertifikasi / memiliki sertifikat SKA/SKT, ini terlihat pada nilai kategori sedang dan tinggi sebesar 97,72% yang meyakinkan bahwa tingginya faktor/variabel yang sangat berpengaruh sehingga Tenaga Kerja tidak memiliki sertifikat.

Table 2 memperlihatkan nilai-nilai variabel sehingga tenaga kerja konstruksi tidak memiliki SKA/SKT. Dimana kategori sangat setuju terdiri dari 8 variabel, dan setuju terdiri dari 4 variabel, dan tidak ada kategori tidak setuju. Variabel yang paling dominan (Sangat Setuju = 88) menjadi alasan sehingga tenaga kerja konstruksi tidak memiliki SKA/SKT adalah Kurangnya informasi tentang SKA/SKT, Kurangnya sosialisasi fungsi SKA/SKT, SKA/SKT hanya persyaratan tender/SBU, Banyaknya persyaratan & prosedur yang harus dilengkapi untuk memperoleh SKA/SKT, SKA/SKT tidak menjamin peningkatan gaji dan jejang karier, SKA/SKT tidak menjamin mendapatkan pekerjaan, SKA/SKT tidak menjamin peningkatan keahlian/keterampilan, serta SKA/SKT membutuhkan biaya yang tinggi.

Adapun Variabel yang paling dominan (setuju = 3) menjadi alasan sehingga tenaga kerja konstruksi tidak memiliki SKA/SKT adalah Masa berlaku SKA/SKT yang singkat, Membutuhkan waktu yang lama dalam memperoleh SKA/SKT, Sulitnya memilih lembaga/tempat yang tepat untuk memperoleh SKA/SKT, serta SKA/SKT tidak berlaku pada proyek non pemerintah, tdk sepenuhnya sebagai persyaratan pada proyek pemerintah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Karakteristik tenaga kerja konstruksi dari segi 1) jenis kelamin terdiri 97,75% Laki-laki, 2,25% Perempuan; 2) Umur : 98,12% umur produktif dan 1,88% di kategori tdk produktif; 3) Pendidikan : SD-SMA, D1/D4, S1, S2/S3 sebesar berturut 54,98%, 20,77%, 23,53%, 0,72%. Jumlah

tenaga kerja konstruksi baik tetap maupun tidak tetap berjumlah 17.366 TK, 464 (2,76%) TK yang memiliki SKA, dan 1001 TK (5,76%) yang memiliki SKT. Dengan demikian dari 754 PPJK untuk 6 wilayah terdiri dari 1485 TK (8,54%) yang memiliki SKA/SKT. Beberapa alasan Tenaga Kerja Konstruksi tidak memiliki SKA/SKT di Sul-Sel, secara berurut paling dominan adalah 1) kurangnya informasi tentang SKA/SKT, 2) kurangnya sosialisasi fungsi SKA/SKT, 3) SKA/SKT tidak menjamin peningkatan gaji dan jejang karier, 4) SKA/SKT tidak menjamin mendapatkan pekerjaan, 5) SKA/SKT tidak menjamin peningkatan keahlian/keterampilan, 6) SKA/SKT hanya persyaratan tender/SBU, 7) SKA/SKT membutuhkan biaya yang tinggi, 8) banyaknya persyaratan & prosedur yang harus dilengkapi untuk memperoleh SKA/SKT.

REFERENSI

- Anonim. 2000. Undang - Undang R I No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Bandung, Citra Umbara.
- Anonim. 2000. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- Anonim. 2010. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Perubahan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000).
- Anonim. 2011. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No.04 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan

Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi. Jakarta: LPJK.

Anonim. 2011. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No.05 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku, dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Terampil Konstruksi. Jakarta: LPJK.

Furchan, 2004, Pengantar Penelitian dalam Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Jelantik I.M. Alit I.M., dan Mayun Nadiasa 2014. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tenaga Kerja Konstruksi untuk Memiliki SKA/SKTK pada Kontraktor di Kabupaten Bandung, Jurnal Spektran, Vol. 2. No. 1, Januari 2014

Simamora, Henry, 2011, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.